



# KABUPATEN TAPANULI SELATAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

## LAPORAN SEMESTER 2

**PENYELENGGARAAN PERCEPATAN  
PENURUNAN STUNTING  
TAHUN 2023**

### **TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING**

Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kab. Tapanuli Selatan, JL. Prof. Lafran Pane-Sipirok Sumatera Utara 22742  
Website : [www.tapselkab.go.id](http://www.tapselkab.go.id)

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**



DISAHKAN OLEH,  
BUPATI KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
SELAKU  
KETUA TIM PENGARAH TPPS KABUPATEN TAPANULI SELATAN

  
H. DOLLY PASARIBU, S.Pt, MM

DISUSUN OLEH,  
TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

SIPIROK, DESEMBER 2023

KETUA TIM PELAKSANA TPPS



Sofyan Adil, SP, MM

WAKIL KETUA TPPS



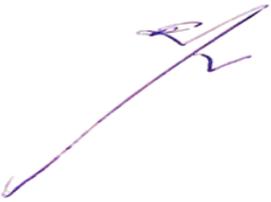
Chairul Rizal Lubis,

SEKRETARIS TPPS



Ahmad Ibrahim Lubis, S.Sos, MM

BIDANG PELAYANAN  
INTERVENSI SENSITIF DAN  
SPESIFIK



dr. Rudi Iskandar, M.Kes

BIDANG PERUBAHAN  
PERILAKU DAN  
PENDAMPINGAN  
KELUARGA



Drs. M. Ingan Dalimunthe

BIDANG KOORDINASI DAN  
KONVERGENSI

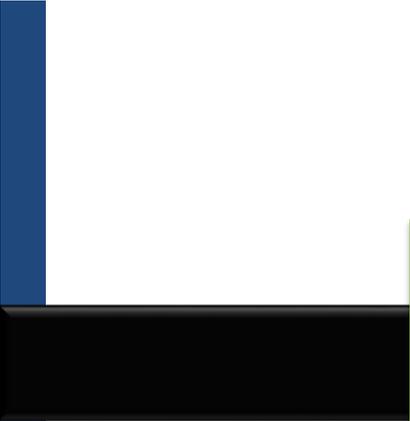


Syabilal Rasyid, ST, MH

BIDANG DATA, MONEV &  
KNOWLEDGE  
MANAGEMENT

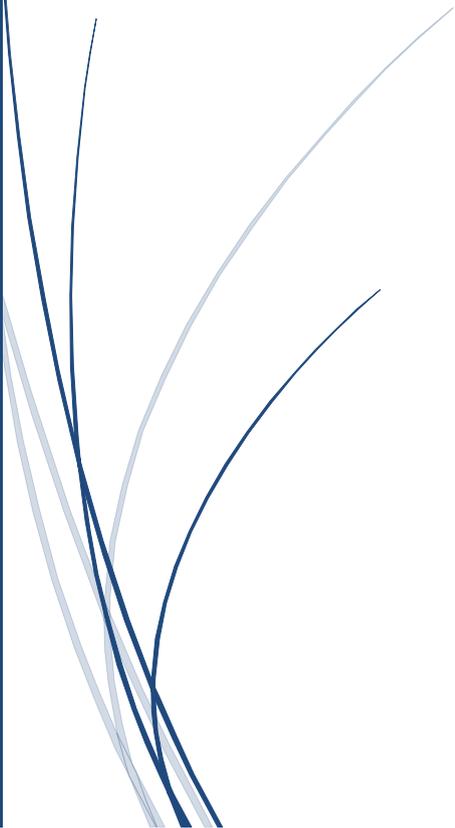


Desi Meliani Gultom, SKM, M.Kes



**LAPORAN SEMESTER 2**  
**(Juli – Desember 2023)**

**PELAKSANAAN PERCEPATAN  
PENURUNAN STUNTING  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	2
1.4 Hasil yang Diharapkan .....	3
<b>BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN ...</b>	<b>4</b>
2.1 Kondisi Geografis Kabupaten Tapanuli Selatan.....	4
2.2 Konvergensi Perencanaan Penganggaran Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 .....	7
<b>BAB III PELAKSANAAN KOORDINASI, KONVERGENSI DAN PERENCANAAN DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING.....</b>	<b>8</b>
3.1 Capaian Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi .....	8
3.2 Data Stunting Kabupaten Tapanuli Selatan.....	9
3.3 Realisasi Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Tapanuli Selatan... .....	10
<b>BAB IV DATA CAPAIAN INDIKATOR CAKUPAN LAYANAN .....</b>	<b>21</b>
4.1 Data Cakupan Percepatan Penurunan Stunting .....	21
<b>BAB V ISU HAMBATAN/KENDALA DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>33</b>
5.1 Hambatan.....	33
5.2 Rekomendasi .....	33
<b>BAB VI PRAKTIK BAIK KAB. TAPANULI SELATAN DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING .....</b>	<b>34</b>
<b>BAB VII RENCANA KERJA BIDANG PELAKSANAAN KOORDINASI, KONVERGENSI, PERENCANAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING .....</b>	<b>36</b>
<b>BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI .....</b>	<b>37</b>
<b>BAB IX CAPAIAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KAB. TAPSEL .....</b>	<b>45</b>
<b>BAB X PENUTUP.....</b>	<b>47</b>

## B A B I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (sumber : Perpres 72 Tahun 2021). Nutrition Report 2016 mencatat bahwa prevalensi stunting di Indonesia berada pada peringkat 108 dari 132 negara. Data menunjukkan bahwa penurunan prevalensi stunting di tingkat nasional sebesar 6,4% selama periode 5 tahun yaitu dari 37,2% (tahun 2013) menjadi 30,8% (tahun 2018). Selanjutnya, menjadi 27,7 % (tahun 2019), 26,9% (tahun 2020), 24,4% (tahun 2021), 21,6% (tahun 2022), tahun 2023 target penurunan prevalensi stunting Kab. Tapanuli Selatan sebesar 17,2%, untuk tahun 2024 sebesar 12% sehingga tercapai prevalensi stunting Indonesia sebesar 14%.

Untuk mencegah dan menurunkan stunting, Pemerintah telah menetapkan kerangka kebijakan yang diputuskan melalui rapat tingkat Menteri tanggal 12 Juli 2017 dipimpin oleh Wakil Presiden dan memutuskan bahwa pencegahan stunting dilakukan dengan pendekatan multi-sektor melalui sinkronisasi program-program nasional, local, masyarakat di tingkat pusat dan daerah; (iii) pada Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tanggal 9 Agustus 2017, memutuskan Lima Pilar Pencegahan Stunting, yaitu: (i) Komitmen dan Visi Kepemimpinan ; (ii) Kampanye Nasional dan Perubahan Perilaku; (iii) Konvergensi, Koordinasi, dan Konsolidasi Program Pusat, Daerah dan Desa; (iv) Gizi Ketahanan Pangan; (v) Pemantauan dan Evaluasi.

Pada tanggal 5 Agustus 2021 telah terbit Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Tujuan Strategi penurunan stunting mempunyai tujuan sebagai berikut (a) menurunkan prevalensi Stunting; (b) meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga; (c) menjamin pemenuhan asupan gizi; (d) memperbaiki pola asuh; © meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan (f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Dengan menyoasar kelompok sasaran yaitu Remaja, Calon pengantin, Ibu hamil, Ibu menyusui, dan Anak berusia 0-59 bulan.

Selanjutnya, pada tanggal 21 Desember 2021 telah terbit Peraturan Kepala BKKBN (Perkaban) No 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) P2S tahun 2021-2024, Intinya terdiri dari : (a) Rencana Aksi Nasional (RAN) P2S ; (b) Mekanisme dan Tata Kerja Pelaksanaan P2S; (c) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan. Dalam mekanisme dan Tata Kerja diatur tentang Struktur dan tugas fungsi TP2S pada seluruh tingkatan. Perban ini merupakan rujukan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting.

## 1.2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- e. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- f. Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.
- g. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
- h. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
- i. Peraturan Kepala BKKBN nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.
- j. Surat Edaran Mendagri No 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Daerah.
- k. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan No. 25 Tahun 2022 Tentang Peran Desa Dalam Percepatan Penurunan Stunting
- l. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan No. 132 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kab. Tapanuli Selatan.

## 1.3. Maksud Dan Tujuan

Adapun maksud disusunnya laporan ini adalah dalam rangka memenuhi amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan Kepala BKKBN (Perkaban) No 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN).

Sedangkan tujuan penyusunan laporan adalah sabagai berikut :

1. Mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten/Kota;
2. Memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten/Kota;
3. Menjadi pertimbangan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten/Kota;
4. Memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan rencana aksi nasional di Kabupaten/Kota; dan
5. Menjadi pertimbangan dalam menyusun rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten/Kota

#### **1.4. Hasil Yang Diharapkan**

Hasil yang diharapkan dari laporan Bidang Koordinasi, Konvergensi Dan Perencanaan Dalam Penurunan Stunting adalah :

1. Tersusunnya laporan kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten/Kota.
2. Diperolehnya umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten/Kota.
3. Tersusunnya bahan pertimbangan dalam perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten/Kota.
4. Diperolehnya kesesuaian pelaksanaan terhadap kegiatan, keluaran, dan target Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan rencana aksi nasional di Kabupaten/Kota.
5. Tersusunnya rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten/Kota.

## B A B II

### GAMBARAN UMUM WILAYAH KAB. TAPANULI SELATAN

#### 2.1 Kondisi Geografis Kabupaten Tapanuli Selatan

Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri dari 15 Kecamatan, 212 Desa dan 36 Kelurahan dengan luas wilayah mencapai 446.735 Ha atau 4.355,35 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sekitar 300.911 jiwa dengan kepadatan penduduk 69,09 jiwa/km<sup>2</sup>. Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan dibatasi oleh :

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Tapanuli Utara
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal.
- c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Kabupaten Mandailing Natal.

#### Peta Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan



### Kondisi Keluarga Berisiko Stunting di Kab. Tapanuli Selatan Tahun 2022

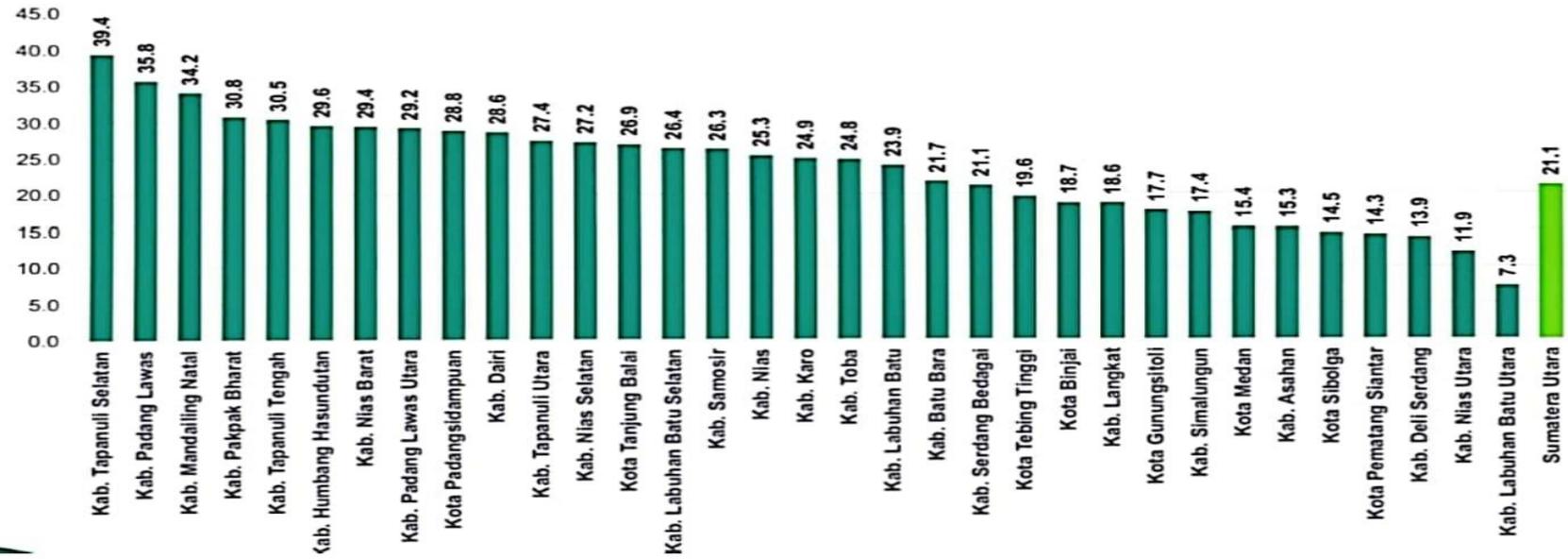
KODE PROVINSI	NAMA PROVINSI	KODE KABUPATEN/KOTA	NAMA KABUPATEN/KOTA	KODE KECAMATAN	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA DENGAN KODE "ADA" (1) DAN "BARU" (5) HASIL VERVAL	JUMLAH KELUARGA BERISIKO STUNTING HASIL VERVAL	JUMLAH KELUARGA TIDAK BERISIKO STUNTING HASIL VERVAL	JUMLAH KELUARGA MEMILIKI BADUTA (0-23 BULAN) HASIL VERVAL	JUMLAH KELUARGA MEMILIKI BALITA (24-49 BULAN) HASIL VERVAL	JUMLAH KELUARGA BERSTATUS PUS HASIL VERVAL	JUMLAH KELUARGA BERSTATUS PUS HAMIL HASIL VERVAL	JUMLAH KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG LAYAK HASIL VERVAL	JUMLAH KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK HASIL VERVAL	JUMLAH KELUARGA DENGAN PUS - TERLALU MUDA HASIL VERVAL	JUMLAH KELUARGA DENGAN PUS - TERLALU TUA HASIL VERVAL	JUMLAH KELUARGA DENGAN PUS - TERLALU DEKAT HASIL VERVAL	JUMLAH KELUARGA DENGAN PUS - TERLALU BANYAK HASIL VERVAL	JUMLAH KELUARGA MEMPEROLEH PENDAMPINGAN OLEH TPK	JUMLAH KELUARGA TIDAK MEMPEROLEH PENDAMPINGAN OLEH TPK	JUMLAH KELUARGA MEMPEROLEH PENDAMPINGAN OLEH TPK BERUPA FASILITAS RUJUKAN	JUMLAH KELUARGA MEMPEROLEH PENDAMPINGAN OLEH TPK BERUPA FASILITAS BANSOS	JUMLAH KELUARGA MEMPEROLEH PENDAMPINGAN OLEH TPK BERUPA LAYANAN KIE	JUMLAH KELUARGA MEMPEROLEH PENDAMPINGAN OLEH TPK BERUPA SURVEILANS	Persentase
12	SUMATERA UTARA	03	TAPANULI SELATAN	01	ANGKOLA BARAT	6.208	3.107	815	2292	435	837	1730	80	337	564	35	157	37	510	3107	0	0	0	0	1730	13,13
12	SUMATERA UTARA	03	TAPANULI SELATAN	02	BATANG TORU	7.545	3694	1307	2284	435	1028	3267	110	138	465	30	351	118	1128	3694	0	0	0	1307	0	17,32
12	SUMATERA UTARA	03	TAPANULI SELATAN	03	ANGKOLA TIMUR	5.791	2557	1332	1225	298	725	1914	92	385	551	72	364	84	654	2557	0	0	0	1332	0	23,00
12	SUMATERA UTARA	03	TAPANULI SELATAN	04	SIPIROK	8.619	1808	1146	665	656	1326	1647	253	708	705	184	216	147	746	1808	0	0	0	0	0	13,30
12	SUMATERA UTARA	03	TAPANULI SELATAN	05	SAIPAR DOLOK HOLE	3.830	1900	776	1138	167	535	1744	46	233	900	91	341	33	405	0	0	0	0	0	0	20,26
12	SUMATERA UTARA	03	TAPANULI SELATAN	06	ANGKOLA SELATAN	6.893	1088	1022	66	456	822	1052	168	332	618	176	325	273	589	1088	0	0	0	1088	0	14,83
12	SUMATERA UTARA	03	TAPANULI SELATAN	07	BATANG ANGKOLA	6.010	2398	1149	1249	361	768	2093	41	430	1220	18	107	44	704	2398	0	0	0	2398	0	19,12
12	SUMATERA UTARA	03	TAPANULI SELATAN	14	ARSE	2.543	442	271	171	147	327	424	34	128	134	48	68	74	151	442	0	1	0	271	0	10,66
12	SUMATERA UTARA	03	TAPANULI SELATAN	20	MARANCAR	2.760	1450	561	889	209	431	552	44	35	252	6	108	164	279	1450	0	0	0	0	0	20,33
12	SUMATERA UTARA	03	TAPANULI SELATAN	21	SAYUR MATINGGI	6.769	1761	1223	538	443	716	1568	113	269	1030	145	549	242	782	1332	439	13	525	24	474	18,07
12	SUMATERA UTARA	03	TAPANULI SELATAN	22	AEK BILAH	1.821	999	306	693	85	165	943	0	119	465	0	93	0	157	0	0	0	0	0	0	16,80
12	SUMATERA UTARA	03	TAPANULI SELATAN	29	MUARA BATANG TORU	3.498	1901	487	1414	250	514	1901	63	52	198	104	232	172	421	1901	0	0	343	1584	0	13,92
12	SUMATERA UTARA	03	TAPANULI SELATAN	30	TANO TOMBANGAN ANG	4.276	2074	434	1562	243	604	1034	43	1021	588	58	49	63	150	959	600	0	0	434	0	10,15
12	SUMATERA UTARA	03	TAPANULI SELATAN	31	ANGKOLA SANGKUNUR	5.518	1614	1264	350	271	524	1251	91	142	728	257	375	185	974	157	1235	0	51	157	0	22,91
12	SUMATERA UTARA	03	TAPANULI SELATAN	32	ANGKOLA MUARA TAJIS	3.238	1336	694	642	234	536	1133	76	199	620	272	430	143	379	16	1320	0	0	0	0	21,43
						75.319	28.129	12.787	15.178	4.690	9.858	22.253	1.254	4.528	9.038	1.496	3.765	1.779	8.029	20.909	3.594	14	919	8.595	2.204	16,98

Sumber Data Hasil Verifikasi dan Validasi PK21 ( Bid. Advin dan Dalduk ) DPPKB Kab. Tapsel

Data Pendataan Keluarga (PK 22) Dengan jumlah keluarga 75319 kk, Terdapat Penurunan Angka Keluarga Berisiko Stunting dari 35997 keluarga berisiko stunting menjadi 12787 kk sehingga menurun sebesar 23210 kk artinya ada penurunan sebesar 64,48 % . Untuk keluarga yang tidak memiliki air minum layak sebesar 4528 kk dan keluarga yang tidak memiliki jamban yang layak sebesar 9038 kk.

## Kondisi Stunting Kab. Tapsel Hasil SSGI Tahun 2022

**PREVALENSI BALITA *STUNTED* (TINGGI BADAN MENURUT UMUR)  
BERDASARKAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA, SSGI 2022**



Dijilahkan dengan CamSi

Sumber : BKPK Kemenkes hasil Survey Prevalensi SSGI Tahun 2022 Provinsi Sumatera Utara.

## 2.2 Konvergensi Perencanaan Penganggaran Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023

Jumlah Anggaran							
APBN		APBD		APBDes		SUMBER LAINNYA	
Berjalan	Rencana	Berjalan	Rencana	Berjalan	Rencana	Berjalan	Rencana
-	-	78.304.216.359	-	158.866.300.000	-	-	-

## 2.3 Penetapan Desa/Kelurahan Lokus (2022, 2023, 2024)

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Desa Lokus s.d 2022	Tahun Intervensi Penanganan		
				2022	2023	2024
1	Angkola timur	15	3	3		4
2	Sipirok	40	3	3		4
3	Saipar Dolok Hole	14	2	2		2
4	Batang Angkola	21	2	2	2	3
5	Sayur Matinggi	19	1	1		5
6	Angkola Selatan	17	2	2	1	5
7	Batang Toru	23			2	-
8	Angkola Sangkunur	17			2	4
9	Arse	10			2	4
10	Muara Batang Toru	9			2	3
11	Aek Bilah	12			2	-
12	Marancar	12				2
13	Sayur Matinggi	19				5
14	Angkola Muara Tais	15				-
15	Angkola Barat	14				4
16	Tantom Angkola	10				2
	<b>Total</b>		<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>42</b>

Sumber : Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor:188.45/540/KPTS/2021 Tentang Penetapan Lokasi Fokus Pencegahan dan Penanganan Stunting Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022-2024 dan terbitnya SK Bupati Nomor : 188.45/232/KPTS/2023 tentang Penambahan Desa Lokus Tahun 2024

Penetapan Desa/Kelurahan Lokasi Fokus (Lokus) pencegahan dan penanganan stunting di Kab. Tapanuli Selatan ditetapkan melalui keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 188.45/540/KPTS/2021 dan 188.45/232/KPTS/2023 Berdasarkan Tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa jumlah desa lokus pada tahun 2022 ada 13 desa yang tersebar di 6 kecamatan. Sementara untuk tahun 2023 ditetapkan 13 desa dan tersebar di 7 kecamatan. Pada tahun 2024 ditetapkan 42 desa lokus yang tersebar di 13 kecamatan. Total desa lokus yang ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berjumlah 81 desa/kelurahan lokasi lokus

**BAB III**  
**PELAKSANAAN KOORDINASI, KONVERGENSI DAN PERENCANAAN**  
**DALAM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING***

**3.1 Capaian Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi\*)**

No	Aksi Konvegensi	Realisasi		Keterangan
		Selesai	Belum	
1	Master Ansit	√		
2	Aksi 1 : Analisis Situasi	√		
3	Aksi 2 : Rencana Kegiatan	√		
4	Aksi 3 : Rembuk <i>Stunting</i>	√		
5	Aksi 4 : Peraturan Bupati/WaliKabupaten tentang Percepatan Penurunan Stunting	√		
6	Aksi 5 : Pembinaan Pelaku dan Pemerintahan Desa/Kelurahan	√		
7	Aksi 6 : Sistem Manajemen Data Stunting	√		
8	Aksi 7 : Pengukuran dan Publikasi Stunting	√		
9	Aksi 8 : Reviu Kinerja Tahunan		√	29 Jan 2024

### 3.2 Data Stunting Kabupaten Tapanuli Selatan

Data Tanggal : 2023-12-02 12:36:25

No	Puskesmas	BB/U			TB/U			BB/TB					
		Sangat Kurang	Kurang	Jlh	Sangat Pendek	Pendek	Jlh	Gizi Buruk	Gizi Kurang	Jlh	Stunting	Wasting	Under weight
01	PINTUPADANG	1	5	1320	5	16	1320	1	11	1320	21	12	6
02	SAYUR MATINGGI	2	1	1300	0	1	1296	0	3	1300	1	3	3
03	BATU HORPAK	0	6	1051	1	4	1051	0	6	1051	5	6	6
04	HURABA	0	5	335	1	10	335	0	0	335	11	0	5
05	PARGARUTAN	0	22	675	10	4	675	1	15	675	14	16	22
06	SIMARPINGGAN	1	3	1693	0	29	1692	2	1	1690	29	3	4
07	SITINJAK	1	3	442	0	1	442	1	3	442	1	4	4
08	SANGKUNUR	0	1	428	0	1	427	0	0	427	1	0	1
09	BATANG TORU	3	4	1042	3	11	1042	0	4	1042	14	4	7
10	MARANCAR UDIK	0	0	741	0	1	741	0	0	741	1	0	0
11	HUTA RAJA	1	23	1398	6	12	1398	2	7	1398	18	9	24
12	DANAU MARSABUT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	HANOPAN	0	0	458	2	16	458	0	1	458	18	1	0
14	SIPAGIMBAR	0	2	419	1	4	419	0	0	419	5	0	2
15	SIMANGAMBAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	BIRU	0	0	354	0	2	354	0	1	354	2	1	0
<b>JUMLAH</b>		<b>9</b>	<b>75</b>	<b>11656</b>	<b>29</b>	<b>112</b>	<b>11650</b>	<b>7</b>	<b>52</b>	<b>11652</b>	<b>141</b>	<b>59</b>	<b>84</b>

\*Sumber : ePPGBM, Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli Selatan, 26 Oktober 2023

Dari data yang bersumber dari ePPGBM Dinas Kesehatan Kab. Tapsel tgl.02 Desember 2023, Dengan jumlah balita yang ditimbang sebanyak 11650 balita ada penurunan Angka Balita Stunting sebanyak 141 balita, Wasting sebanyak 59 balita dan untuk Underweight sebanyak 84 balita

### 3.3 Realisasi Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting di Kab Tapanuli Selatan

No	Kegiatan	Hasil Capaian	Tanggal Pelaksanaan	Tempat
1	Rapat Tim TPPS Dalam Rangka Persiapan Survey SKI Tahun 2023 di Kab. Tapsel	Jadwal Survey SKI tgl. 11 Agustus – 29 September	Senin/ 10 Juli 2023	Aula Sarasi 3 Pemkab. Tapsel
2	Koordinasi dengan Dinas PUPR dan Dinas Perkim, Tentang Intervensi Sensitif Yang Telah Dilakukan Dinas PUPR dan Dinas Perkim	Data Intervensi yang telah dilakukan oleh Dinas PUPR dan Perkim tentang Air Bersih dan Sanitasi	Rabu/ 12 Juli 2023	Ruang Rapat Dinas PUPR
3	Koordinasi Dengan Dinas Ketapang tentang Panganan Lokal Untuk KBS	Data pengadaan pangan local untuk KBS yang telah dilakukan oleh Dinas ketapang	Kamis/ 13 Juli 2023	Ruang Rapat Dinas Ketapang
4	Koordinasi Dengan Dinas Capil dan Dinas Pendidikan tentang Sosialisasi Data Balita Yang sudah Masuk Dalam KK	Data Balita yang ada pada Dinas capil utk tahun 2023	Senin/17 Juli 2023	Ruang Kerja Kadis Pendidikan
5	Rapat Koordinasi Tim TPPS Kab. Tapsel	Persiapan data Balita untuk pembanding persiapan pelaksanaan SKI tahun 2023	Kamis/ 3 Agustus 2023	Aula Sarasi Lt. 3 Kantor Bupati Tapsel
6	Sosialisasi Pelaksanaan Survey SKI oleh TA. Satgas kepada TP PKK Kab. Tapsel	Jadwal pelaksanaan SKI dan kesiapan Tim TPPS Desa serta TPP PKK Desa	Senin/ 7 Agustus 2023	Aula Sarasi Lt. 3 Kantor Bupati Tapsel
7	Sosialisasi Pelaksanaan Survey SKI di Kec. Angkola Timur	Persiapan pelaksanaan SKI di kec. Angkola Timur	Rabu / 9 Agustus 2023	Aula Kantor Camat Angkola Timur
8	Pelepasan Enumerator oleh Bupati Tapsel di dampingi oleh PJT SKI Kab. Tapsel	Kesiapan Desa dan Kelurahan untuk mendukung terlaksananya SKI	Jum'at/ 11 Agustus 2023	Kantor Camat Angkola Timur
9	Rapat Kerja dengan BPK RI bersama Kaban Bappeda, Kadis PPKB, Kadis Kesehatan dan TA Satgas	Evaluasi oleh BPK RI tentang Penggunaan Dana Stunting terhadap APBD dan APBN	Rabu/ 30 Agustus 2023	Ruang Rapat Sekda Tapsel
10	Mendampingi Ketua TPPS Kab. Tapsel Dalam Rangka Kunjungan Perguruan Tinggi Dalam Dukungan PPS di Kab. Tapsel	Dukungan Perguruan Tinggi terhadap penurunan stunting di Kab. Tapsel	Rabu/6 September 2023	Ruang Rapat Sekda Kab. Tapsel
11	Rapat Tim TPPS Persiapan AKS ke 2 Kab. Tapsel	Tim Tekhnis dan Tim Pakar menentukan sasaran untuk menjadi audit, utk pelaksanaan Diseminasi ke 2 AKS	Selasa/19 September2023	Ruang Kerja Kaban Bappeda Tapsel

12	Sosialisasi Pelaksanaan PK 23 oleh Perw. BKKBN Sumut	Pelaksanaan pendataan keluarga tahun 2023 untuk KBS di Kab. Tapsel	Rabu/20 September 2023	Aula DPPKB Kab. Tapsel
13	Gercep Mendampingi Mengunjungi/Melihat Keluarga Berisiko Stunting Bersama Bupati Tapsel	RTL terhadap keluarga berisiko stunting, langsung oleh Bupati Tapsel	Kamis/21 September 2023	Desa Huta Holbung kec. Angkola Muara Tais kab. Tapsel
14	Rapat Persiapan Pelaksanaan AKS ke 2 Kab. Tapsel	Data dan sasaran terhadap Diseminasi ke 2	Senin/25 September 2023	Ruang Rapat DPPKB Kab. Tapsel
15	Pelaksanaan Audit Kasus Stunting ke 2 Kab. Tapsel Tahun 2023	Paparan oleh Tim Pakar tentang RTL sasaran audit	Selasa/26 September 2023	Aula Sarasi Lt. 3 Kantor Bupati
16	Forum Koordinasi PPS di Kab. Tapsel oleh Perw. BKKBN Prov. Sumut	Dukungan seluruh unsur stake holder dalam percepatan penurunan stunting	Rabu/27 September 2023	Hotel Torsibohi Sipirok Kab. Tapsel
17	Pelaksanaan Verval Lapangan Program I-SIM regencies 2023 di Kab. Tapsel	Verifikasi I-SIM terhadap penanganan stunting di Kab. Tapsel	Kamis/ 12 Oktober 2023	Aula Sarasi Lt. 3 Kantor Bupati Tapsel
19	Koordinasi Persiapan Bahan Untuk Zoom Konsolidasi dan Akselerasi Menu BOKB Audit Kasus Stunting dan BKB KIT Stunting Indonesia (Kolaborasi) Edisi Oktober 2023 dengan Sekretaris	Persiapan capaian serapan dana BOKB stunting dan BKB Kit Stunting	Selasa/ 24 Oktober 2023	Ruang Kerja Sekretaris DPPKB Tapsel
20	Konsolidasi dan Akselerasi Menu BOKB Audit Kasus Stunting dan BKB KIT Stunting Indonesia (Kolaborasi) Edisi Oktober 2023	Hasil capaian dana BOKB stunting dan BKB Kit Stunting untuk penilaian oleh BKKBN Pusat	Rabu/25 Oktober 2023	Zoom Meeting
21	Monitoring dan Evaluasi T.A Satgas Stunting oleh BKKBN Perw. Sumut	Tim Monev BKKBN tentang Kinerja T.A Satgas terhadap fungsi satgas di Kab. Tapsel.	Rabu/15 November 2023	Sekretariat DPPKB Tapsel
22	Pelaksanaan Pelatihan TPK Penurunan Angka Stunting di Kec. Batangtoru, Angk. Sangkunur, Muara Batangtoru	Kemampuan Tim TPK dalam melakukan pendampingan terhadap 4 sasaran dalam pencegahan stunting di Desa/Kelurahan	Senin/27 November 2023	Aula Puskesmas Batangtoru
23	Pelaksanaan Pelatihan TPK Penurunan Angka Stunting di Kec. Angkola Barat dan Angkola Selatan	Kemampuan Tim TPK dalam melakukan pendampingan terhadap 4 sasaran dalam pencegahan stunting di Desa/Kelurahan	Selasa/28 November 2023	Aula Kantor Camat Angkola Barat
24	Pelaksanaan Pelatihan TPK Penurunan Angka Stunting di Kec. Batang Angkola dan	Kemampuan Tim TPK dalam melakukan pendampingan terhadap 4	Rabu/29 November 2023	Aula Kantor Camat Batang Angkola

	Muaratais	sasaran dalam pencegahan stunting di Desa/Kelurahan		
25	Pelaksanaan Pelatihan TPK Penurunan Angka Stunting di Kec. Sayurmatinggi dan Angkola Tantom	Kemampuan Tim TPK dalam melakukan pendampingan terhadap 4 sasaran dalam pencegahan stunting di Desa/Kelurahan	Kamis/ 30 November 2023	Aula Kantor Camat Sayurmatinggi
26	Pelaksanaan Aksi 8 Riview Kinerja PPS di Kab. Tapsel Tahun 2023	Kondisi dan Capaian 8 Aksi Konvergensi oleh Bina Bangda Kemendagri		Aula Bappeda Kab. Tapsel
27	Monitoring dan Evaluasi TPPS dan TPK, Tingkat Kabupaten/Kecamatan/Desa-Kelurahan	Evaluasi kinerja TPPS Kabupaten/Kecamatan/Desa Kelurahan dan TPK	Aula DPPKB Rabu/ 20 Desember 2023	Aula DPPKB Tapsel

**DOKUMENTASI KEGIATAN KOORDINASI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**



Menghadiri HARGANAS di Palembang Sumatera Selatan



Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting  
Kab. Tapanuli Selatan Dengan Buapti Tapanuli Selatan Tg. 10 Juli 2023  
Dalam Rangka Persiapan SKI di Kab. Tapsel Tahun 2023



Rapat Zoom Monitoring dan Evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Kab. Tapanuli Selatan Dengan BAPPEDA Prov. Sumut Tgl. 21 Juli 2023



Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Pelaksanaan Survey SKI Kab. Tapanuli Selatan Tgl. 03 Agustus 2023



Menghadiri Harganas Prov. Sumatera Utara ke 30 di Kab. Samosir Kab. Tapanuli Selatan Meraih 4 Penghargaan Tgl. 16 Agustus 2023



Rapat Tim TPPS Kab. Tapanuli Selatan Persiapan Audit Kasus Stunting ke 2  
Tanggal Selasa 19 September 2023



Bupati Tapsel Mengunjungi Keluarga Berisiko Stunting, Kamis 21 September 2023



Pelaksanaan Audit Kasus Stunting ke 2 Kab. Tapanuli Selatan Tahun 2023  
Pada hari Selasa 26 September 2023



Forum Koordinasi PPS di Kab. Tapsel oleh Perw. BKKBN Prov. Sumut  
Tgl. Rabu 27 September 2023



Pelaksanaan Verval Lapangan Program I-SIM regencies 2023 di Kab. Tapsel  
Tgl. Kamis 12 Oktober 2023



Rapat Koordinasi TPPS Kab. Tapsel ttg Hasil SDGs Tapsel  
Tgl. Selasa 17 Oktober 2023



Koordinasi dengan Kadis Kesehatan Tapsel Terkait data ePPGBM untuk Bulan Oktober 2023 Tgl. Rabu 18 Oktober 2023



Zoom Konsolidasi dan Akselerasi Menu BOKB Audit Kasus Stunting dan BKB KIT Stunting Indonesia (Kolaborasi) Edisi Oktober 2023, Tgl. Rabu 25 Oktober 2023



Pemberian PMT BAAS kepada Balita di Kec. Angkola Timur oleh PT. Toba Pulp Lestari Tbk dihadiri oleh Ketua TP PKK Kab. Tapsel, Tgl. Selasa 31 Oktober 2023



Monitoring dan Evaluasi T.A Satgas Stunting oleh BKKBN Perw. Sumut  
Tgl. Rabu 15 Nopember 2023



Rapat Koordinasi DPPKB tentang Dana Audit Kasus Stunting ke 2  
Tgl. Senin 20 Nopember 2023



Roadshow Pelaksanaan Pelatihan TPK Penurunan Angka Stunting di Kec. Batangtoru, Angk. Sangkunur,  
Muara Batangtoru, Tgl. Senin 27 Nopember 2023



Roadshow Pelaksanaan Pelatihan TPK Penurunan Angka Stunting di Kec. Angkola Barat dan Angkola Selatan, Tgl. Selasa 28 Nopember 2023



Roadshow Pelaksanaan Pelatihan TPK Penurunan Angka Stunting di Kec. Batang Angkola dan Angkola Muaratais, Tgl. Rabu 29 Nopember 2023



Roadshow Narasumber Pelaksanaan Pelatihan TPK Penurunan Angka Stunting di Kec. Sayurmatangi dan Angkola Tantom, Tgl. Kamis 30 Nopember 2023

### Photo Kegiatan Desember 2023

**Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tim Percepatan Penurunan Stunting dan TPK  
Kabupaten / Kecamatan / Desa-Kelurahan oleh Perw. BKKBN Prov. Sumut  
(Tgl. 20 Desember 2023 Aula DPPKB Kab. Tapsel)**



## BAB IV

### DATA CAPAIAN INDIKATOR PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

#### 4.1 Data Cakupan Percepatan Penurunan Stunting

Laporan Capaian Indikator TPPS Kabupaten/Kota https://ee-eu.kobotoolbox.org/x/PuBait9x

### Laporan Capaian Indikator TPPS Kabupaten/Kota

Tim Percepatan Penurunan Stunting

---

Pilih Periode Laporan

Semester 1  Semester 2

---

Pilih Tahun

Tahun 2023  Tahun 2024

---

Provinsi

<input type="radio"/> ACEH	<input checked="" type="radio"/> SUMATERA UTARA	<input type="radio"/> SUMATERA BARAT
<input type="radio"/> RIAU	<input type="radio"/> JAMBI	<input type="radio"/> SUMATERA SELATAN
<input type="radio"/> BENGKULU	<input type="radio"/> LAMPUNG	<input type="radio"/> KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
<input type="radio"/> KEPULAUAN RIAU	<input type="radio"/> DKI JAKARTA	<input type="radio"/> JAWA BARAT
<input type="radio"/> JAWA TENGAH	<input type="radio"/> DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	<input type="radio"/> JAWA TIMUR
<input type="radio"/> BANTEN	<input type="radio"/> BALI	<input type="radio"/> NUSA TENGGARA BARAT
<input type="radio"/> NUSA TENGGARA TIMUR	<input type="radio"/> KALIMANTAN BARAT	<input type="radio"/> KALIMANTAN TENGAH
<input type="radio"/> KALIMANTAN SELATAN	<input type="radio"/> KALIMANTAN TIMUR	<input type="radio"/> KALIMANTAN UTARA
<input type="radio"/> SULAWESI UTARA	<input type="radio"/> SULAWESI TENGAH	<input type="radio"/> SULAWESI SELATAN
<input type="radio"/> SULAWESI TENGGARA	<input type="radio"/> GORONTALO	<input type="radio"/> SULAWESI BARAT
<input type="radio"/> MALUKU	<input type="radio"/> MALUKU UTARA	<input type="radio"/> PAPUA
<input type="radio"/> PAPUA BARAT		

---

Kabupaten/Kota

<input type="radio"/> TAPANULI TENGAH	<input type="radio"/> TAPANULI UTARA	<input checked="" type="radio"/> TAPANULI SELATAN
<input type="radio"/> NIAS	<input type="radio"/> LANGKAT	<input type="radio"/> KARO
<input type="radio"/> DELI SERDANG	<input type="radio"/> SIMALUNGUN	<input type="radio"/> ASAHAN
<input type="radio"/> LABUHANBATU	<input type="radio"/> DAIRI	<input type="radio"/> TOBA SAMOSIR
<input type="radio"/> MANDAILING NATAL	<input type="radio"/> NIAS SELATAN	<input type="radio"/> PAKPAK BHARAT
<input type="radio"/> HUMBANG HASUNDUTAN	<input type="radio"/> SAMOSIR	<input type="radio"/> SERDANG BEDAGAI
<input type="radio"/> BATU BARA	<input type="radio"/> PADANG LAWAS UTARA	<input type="radio"/> PADANG LAWAS
<input type="radio"/> LABUHANBATU SELATAN	<input type="radio"/> LABUHANBATU UTARA	<input type="radio"/> NIAS UTARA
<input type="radio"/> NIAS BARAT	<input type="radio"/> KOTA MEDAN	<input type="radio"/> KOTA PEMATANG SIANTAR
<input type="radio"/> KOTA SIBOLGA	<input type="radio"/> KOTA TANJUNG BALAI	<input type="radio"/> KOTA BINJAI
<input type="radio"/> KOTA TEBING TINGGI	<input type="radio"/> KOTA PADANGSIDIMPUAN	<input type="radio"/> KOTA GUNUNGSITOLI

---

**Blok 2 : Capaian Perpres Lampiran B**

---

1 of 12 27/12/2023, 17:18

## » Blok 2A : Indikator Pilar 1

## » » Indikator 1A2 : Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat kabupaten/kota

Apakah terdapat rapat koordinasi tahunan di kabupaten/kota? \*

- Ya  
 Tidak

## » » Indikator 1A3 : Terselenggaranya rembug Stunting tingkat kecamatan

Apakah terselenggara rembug Stunting tingkat kecamatan? \*

- Ya  
 Tidak

## » » Indikator 1A4 : Tersedianya kebijakan/peraturan bupati/walikota tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan Stunting

Apakah tersedia kebijakan/peraturan bupati/walikota tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan Stunting? \*

- Ya  
 Tidak

## » » Indikator 1A5 : Tersedianya bidan desa/kelurahan sesuai kebutuhan

Jumlah desa/kelurahan

248

Jumlah desa/kelurahan yang memiliki bidan

235

## » » Indikator 1A6 : Jumlah desa/kelurahan bebas Stunting

Jumlah desa/kelurahan bebas Stunting \*

12

## » » Indikator 1A8 : Persentase Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang meningkatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan Stunting

Apakah Pemerintah Daerah kabupaten/kota meningkatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan Stunting? \*

- Ya  
 Tidak

## » » Indikator 1B1 : Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan Percepatan Penurunan Stunting

Jumlah desa	*	Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan Percepatan Penurunan Stunting	*
212		212	

» » **Indikator 1B3 : Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota**

Jumlah desa/kelurahan yang KPM-nya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah	*
209	

» **Blok 2B : Indikator Pilar 2**

» » **Indikator 2A1 : Terlaksananya kampanye nasional pencegahan Stunting**

Apakah terlaksana kampanye nasional pencegahan Stunting?	*
<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	

» » **Indikator 2A2 : Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)**

Capaian:	*
80	

» » **Indikator 2A3 : Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)**

Capaian:	*
69	

» » **Indikator 2B1 : Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan Stunting bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Apakah kabupaten/kota yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan Stunting bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)?	*
<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	

» » **Indikator 2B2 : Persentase desa/kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan Stunting sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di kabupaten/kota**

Jumlah desa/kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih Stunting \*

135

» » Indikator 2B3 : Persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI)

Jumlah PAUD \*

189

Jumlah PAUD Holistik Integratif (PAUD-HI) \*

100

» » Indikator 2B4 : Terpenuhi standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu

Jumlah posyandu \*

535

Jumlah posyandu memiliki standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang \*

535

» » Indikator 2B5 : Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)

Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan kelas BKB 1.000 HPK \*

111

» » Indikator 2B6 : Persentase kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi

Capaian: \*

100

» » Indikator 2B7 : Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja

Capaian: \*

52

» » Indikator 2C2 : Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan Stunting

Capaian: \*

28

» Blok 2C : Indikator Pilar 3

» » Indikator 3A2 : Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan aksi konvergensi Percepatan Penurunan Stunting

Apakah kabupaten/kota melaksanakan aksi konvergensi Percepatan Penurunan Stunting? \*

- Ya  
 Tidak

» » Indikator 3A3 : Persentase desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan

Jumlah desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan \*

212

» » Indikator 3A4 : Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan Stunting

Jumlah desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana \*

210

» » Indikator 3A5 : Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.

Jumlah desa/kelurahan yang melakukan Konvergensi \*

212

» » Indikator 3A6 : Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM \*

90

» » Indikator 3A7 : Persentase calon pengantin/calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD)

Capaian: \*

53

» » Indikator 3A14 : Persentase kabupaten/kota yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan Stunting.

Apakah kabupaten/kota mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan Stunting? \*

- Ya  
 Tidak

» » **Indikator 3A15 : Persentase kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam Percepatan Penurunan Stunting.**

Apakah kabupaten/kota mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam Percepatan Penurunan Stunting? \*

- Ya  
 Tidak

» » **Indikator 3B2 : Cakupan calon pengantin yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pra-nikah**

Capaian: \*

64

» » **Indikator 3B3 : Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin)**

Capaian: \*

79

» » **Indikator 3B4 : Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko Stunting**

Apakah tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko Stunting? \*

- Ya  
 Tidak

» » **Indikator 3B5 : Persentase kabupaten/kota dengan Age Spesific Fertility Rate /ASFR (15-19) paling sedikit 18 per 1.000**

Angka Age Spesific Fertility Rate /ASFR (15-19) kabupaten/kota \*

100

» » **Indikator 3B7 : Persentase unmet need pelayanan keluarga berencana**

Capaian: \*

13

» **Blok 2D : Indikator Pilar 4**

» » **Indikator 4A1 : Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi.**

Capaian: \*

65

» » Indikator 4A2 : Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri

Capaian:

69

» » Indikator 4A3 : Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui dan anak baduta yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu/MPASI)

Capaian:

10

» » Indikator 4A4 : Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat.

Capaian:

5

» » Indikator 4A5 : Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan non-tunai.

Capaian:

10

» » Indikator 4A6 : Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan

Capaian:

40

» » Indikator 4B1 : Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha.

Capaian:

0

» Blok 2E : Indikator Pilar 5

» » Indikator 5A6 : Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Apakah terselenggara Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Pemerintah Daerah kabupaten/kota? \*

- Ya  
 Tidak

» » **Indikator 5A7 : Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Pemerintah Desa.**

Apakah terselenggara Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Pemerintah Desa? \*

- Ya  
 Tidak

» » **Indikator 5A8 : Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) Stunting.**

Apakah terselenggara audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) Stunting? \*

- Ya  
 Tidak

» » **Indikator 5B3 : Tersedianya data keluarga risiko Stunting yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA).**

Apakah tersedia data keluarga risiko Stunting yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA)? \*

- Ya  
 Tidak

» » **Indikator 5B5 : Persentase kabupaten/kota yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan Stunting**

Apakah kabupaten/kota mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan Stunting? \*

- Ya  
 Tidak

### Blok 3 : Capaian RAN PASTI

» **Blok 3A : Indikator RAN PASTI Kluster Manajerial**

» » **Indikator RAN PASTI M2 : Persentase kabupaten/kota yang mengalokasikan proporsi 70% anggaran intervensi sensitif, 25% anggaran intervensi spesifik dan 5% anggaran intervensi koordinatif**

Apakah kabupaten/kota mengalokasikan proporsi 70% anggaran intervensi sensitif, 25% anggaran intervensi spesifik dan 5% anggaran intervensi koordinatif? \*

- Ya  
 Tidak

» » Indikator RAN PASTI M3 : Persentase kabupaten/kota yang tidak memiliki temuan hasil pemeriksaan atas perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting

Apakah ada temuan dari hasil pemeriksaan atas perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting? \*

- Ya  
 Tidak

» » Indikator RAN PASTI M4 : Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi APBDes minimal 10% untuk Percepatan Penurunan Stunting dari tahun sebelumnya

Jumlah desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi APBDes \*

212

» Blok 3B : Indikator RAN PASTI Kluster Operasional

» » Indikator RAN PASTI O3 : Persentase desa/kelurahan yang TPK nya melakukan KIE kelompok minimal 1 kali per bulan

Jumlah desa/kelurahan yang melakukan KIE \*

66

» » Indikator RAN PASTI O4 : Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan KIE interpersonal sesuai standar

Capaian: \*

23

» » Indikator RAN PASTI O5 : Persentase Ibu hamil yang menerima pendampingan

Capaian: \*

22

» » Indikator RAN PASTI O8 : Persentase Ibu hamil dengan Pertumbuhan Janin Terhambat (PJT) yang mendapat tata laksana kesehatan

Capaian: \*

1

» » Indikator RAN PASTI O11 : Persentase keluarga dengan anak usia 0-23 bulan yang mendapatkan pendampingan

Capaian:

100

» » Indikator RAN PASTI O12 : Persentase keluarga dengan anak usia 0 bulan dengan berat badan < 2.500 gram yang mendapatkan tatalaksana kesehatan dan gizi

Capaian:

100

» » Indikator RAN PASTI O13 : Persentase keluarga dengan anak usia 0 bulan dengan panjang < 48 cm yang mendapatkan tatalaksana kesehatan dan gizi

Capaian:

100

» » Indikator RAN PASTI O17 : Persentase keluarga dengan anak usia 0-23 bulan dengan infeksi kronis yang mendapatkan tatalaksana kesehatan

Capaian:

100

» » Indikator RAN PASTI O19 : Persentase keluarga anak usia 0-23 bulan dengan gizi buruk yang mendapatkan tata laksana gizi buruk

Capaian:

100

» » Indikator RAN PASTI O20 : Persentase Balita 0-23 bulan dengan berat badan dan panjang/tinggi badan sesuai standard

Capaian:

96

» » Indikator RAN PASTI O21 : Persentase balita 0-23 bulan yang dipantau perkembangannya sesuai standard

Capaian:

98

» » Indikator RAN PASTI O22 : Persentase anak usia 24-59 bulan dengan infeksi kronis yang mendapatkan tatalaksana kesehatan

Capaian: \*

100

**» » Indikator RAN PASTI O25 : Persentase Balita 0-59 bulan dengan berat badan dan panjang/tinggi badan sesuai standard**

Capaian: \*

95

**» » Indikator RAN PASTI O26 : Persentase balita 0-59 bulan yang dipantau perkembangannya sesuai standard**

Capaian: \*

95

**» » Indikator RAN PASTI O27 : Cakupan keluarga prasejahtera berisiko Stunting penerima bantuan sosial**

Capaian: \*

2

**» » Indikator RAN PASTI O32 : Persentase keluarga berisiko Stunting yang mempunyai air minum layak**

Capaian: \*

71

**» » Indikator RAN PASTI O33 : Persentase keluarga berisiko Stunting yang memiliki rumah layak huni**

Capaian: \*

45

**» » Indikator RAN PASTI O34 : Persentase keluarga berisiko Stunting yang mempunyai jamban sehat**

Capaian: \*

48

**» » Indikator RAN PASTI O35 : Persentase desa prioritas yang melaksanakan Dapur Gizi Keluarga berbasis pangan lokal**

Jumlah desa prioritas yang melaksanakan Dapur Gizi Keluarga berbasis pangan lokal \*

10

» » Indikator RAN PASTI O37 : Persentase catin anemia yang mengonsumsi 90 Tablet Tambah Darah (TTD)

Capaian:

100

» » Indikator RAN PASTI O38 : Persentase catin yang mendapatkan tatalaksana kesehatan dan gizi.

Capaian:

98

» » Indikator RAN PASTI O39 : Persentase kab/kota yang memiliki tim audit Stunting

Apakah kabupaten/kota memiliki tim audit Stunting?

- Ya  
 Tidak

» » Indikator RAN PASTI O40 : Persentase pelaksanaan audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga 2 kali dalam setahun

Apakah dilaksanakan audit kasus Stunting kabupaten/kota dan manajemen pendampingan keluarga 2 kali dalam setahun?

- Ya  
 Tidak

» » Indikator RAN PASTI O41 : Persentase tindak lanjut hasil audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga 2 kali dalam setahun

Apakah dilaksanakan tindak lanjut hasil audit kasus Stunting kabupaten/kota dan manajemen pendampingan keluarga 2 kali dalam setahun?

- Ya  
 Tidak

» » Indikator RAN PASTI O42 : Persentase diseminasi hasil audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga 2 kali dalam setahun

Apakah dilaksanakan diseminasi hasil audit kasus Stunting kabupaten/kota dan manajemen pendampingan keluarga 2 kali dalam setahun?

- Ya  
 Tidak

## **BAB V**

### **ISU HAMBATAN / KENDALA DAN REKOMENDASI**

#### **5.1 Hambatan**

Dalam pelaksanaan konvergensi penanganan stunting, ditemukan beberapa hambatan yaitu:

1. Pelaksanaan Aksi Konvergensi pada periode Juli – Desember 2023 tidak ada hambatan yang mempengaruhi terhadap koordinasi dengan seluruh OPD OPD terkait percepatan penurunan stuntingstunting di Kab. Tapanuli Selatan.
2. Anggaran yang ada pada Dana Desa tidak maksimal penggunaannya untuk percepatan penurunan stunting di seluruh Desa di Kab. Tapanuli Selatan.
3. Semua OPD belum sepenuhnya ikut serta dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting

#### **5.2 Rekomendasi**

Rekomendasi dari bidang pelaksanaan koordinasi, konvergensi dan perencanaan percepatan penurunan stunting sebagai berikut :

1. Monitoring dan Evaluasi Posyandu oleh seluruh OPD harus tetap berjalan
2. Perlu adanya pengawasan 10% anggaran Dana Desa dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Kab. Tapanuli Selatan
3. Dokumen data yang terintegrasi dalam Satu data stunting Kab. Tapanuli Selatan
4. Adanya komitmen pemerintah daerah dan lintas sector dalam percepatan penurunan stunting di Kab. Tapanuli Selatan
5. Adanya penambahan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan stunting.
6. Peran serta lembaga non pemerintahan perlu ditingkatkan.
7. Menghimpun dana CSR dari seluruh perusahaan yang ada di Kab. Tapanuli Selatan untuk membantu percepatan penurunan stunting.

**BAB VI**  
**PRAKTIK BAIK KAB. TAPANULI SELATAN**  
**DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING**



Pemberian Bantuan PMT oleh Bupati Tapsel kepada Balita



BAAS Pemberian PMT oleh Bapak Asuh PT. TPL Tbk  
Kepada Anak Asuh Balita Stunting dan Gizi Buruk di Kec. Sipirok dan  
Angkola Timur dan



Pemberian PMT oleh Yon C Brimob dan Sosialisasi Cegah Stunting  
Dengan 1000 HPK oleh TA Satgas Stunting Kab. Tapsel

## **BAB VII**

### **RENCANA KERJA BIDANG PELAKSANAAN KOORDINASI, KONVERGENSI DAN PERENCANAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING**

Rencana kerja untuk tahun selanjutnya terkait percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu:

1. Melakukan koordinasi yang intens dengan para pemangku kepentingan yang menunjang dalam percepatan penurunan stunting.
2. Melakukan pemantauan secara berkala dengan kegiatan percepatan penurunan stunting yang sudah dilaksanakan oleh OPD terkait.
3. Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan stunting untuk tahun berikutnya.
4. Melakukan reviu dan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan stunting tahun 2023.
5. Menganalisa masalah-masalah yang belum tuntas pada tahun 2022 untuk menjadi bahan tindak lanjut pada tahun 2023
6. Melibatkan pentahelix dalam percepatan penurunan stunting di Tahun 2024.

**BAB VIII**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

<b>Tanggal</b>	:	<b>22 Desember 2023</b>
<b>Nama Yang Mengisi Form</b>	:	<b>Abdul Latif Lubis, S.E., M.M</b> <b>T.A Satgas Stunting Kab. Tapanuli Selatan</b>
<p>Tugas dan fungsi satgas adalah untuk koordinasi, fasilitasi, konsultasi dan pengawalan satu data di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Satgas stunting bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting yaitu Kepala BKKBN dalam hal ini diwakilkan kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi. Satgas wajib memberikan laporan kepada Kepala Perwakilan secara bulanan, tiga bulanan, dan akhir tahun yang meliputi aktivitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan format diminta kepala pelaksana percepatan penurunan stunting.</p>		
NO	TEMATIK	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana posisi dan peran satgas dalam Percepatan Penurun Stunting di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan. ? <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peran Technical Assistant Satgas Stunting di Kab. Tapanuli Selatan sangat berguna dan sangat mendukung dalam proses percepatan penurunan stunting di Kab. Tapanuli Selatan</li> </ul> </li> <li>2. Bagaimana koordinasi satgas dengan TPPS Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan/Kelurahan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi yang dilakukan T.A Satgas berjalan sangat baik dengan TPPS Kabupaten, TPPS Kecamatan hingga ke TPPS Desa / Kelurahan.</li> </ul> </li> <li>3. Bagaimana koordinasi satgas dengan Pelaksana teknis (PKB/PLKB/TPK) dalam pelaksanaan strategi PPS <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi T.A Satgas sangat baik dengan tenaga tekhnis dilapangan dengan PKB/PLKB/TPK serta didukung oleh DPPKB Kab. Tapsel</li> </ul> </li> <li>4. Apa kelebihan/kekuatan satgas stunting dalam peran PPS di provinsi/kab/kota <ul style="list-style-type: none"> <li>- T.A Satgas di Kab. Tapsel bisa melakukan koordinasi terhadap seluruh OPD terkait stunting.</li> <li>- T.A Satgas Kab. Tapsel bisa memberikan motivasi kinerja terhadap seluruh rekan kerja OPD terkait stunting di Kab. Tapsel sehingga bisa berpengaruh terhadap percepatan penurunan stunting di Kab. Tapsel.</li> </ul> </li> <li>5. Kelemahan/kekurangan satgas stunting dalam peran PPS di provinsi/kab/kota <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya dukungan sarana dan prasarana T.A Satgas Stunting dalam pelaksanaan tugas tugas di lapangan.</li> </ul> </li> <li>6. Peluang satgas stunting dalam upaya PPS <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melibatkan seluruh stake holder dalam program pencegahan stunting di Kab. Tapsel mempunyai banyak keuntungan dan peluang karena stunting bukan hanya masalah Pemerintah saja tetapi masalah semua masyarakat, sehingga diharapkan dapat memutus siklus stunting.</li> </ul> </li> <li>7. Tantangan satgas stunting dalam Upaya PPS <ul style="list-style-type: none"> <li>- TA Satgas dalam menghadapi tantangan, ada tiga masalah mendasar terkait stunting yaitu masih tingginya angka prevalensi, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang stunting, dan perlunya upaya pencegahan stunting dimana stunting dapat menimbulkan masalah lain seperti pengaruhnya terhadap tingkat kecerdasan anak dan masalah sosial.</li> </ul> </li> </ol>	

A.	AUDIT KASUS STUNTING
1	<p>Audit Kasus Stunting (Status Terlaksana)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbentuk SK Tim AKS SK Tim AKS Kab. Tapsel No. 463/1279/2022 tgl. 21 Februari 2022</li> <li>- Melaksanakan Audit dan Manajemen Pendampingan</li> <li>- Diseminasi AKS Diseminasi AKS siklus 1 terlaksana pada tgl. 9 Februari 2023 Diseminasi AKS siklus 2 terlaksana pada tgl. 26 September 2023</li> <li>- Evaluasi RTL Evaluasi rencana tindak lanjut oleh tim teknis yang telah direkomendasikan oleh tim pakar, untuk melihat apakah intervensi sudah terlaksana dan sudah mengalami perubahan pada sasaran audit.</li> </ul>
2	<p>Bagaimana koordinasi tim teknis dan tim pakar dalam pelaksanaan AKS?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi antara tim teknis AKS dengan tim pakar berjalan sesuai dengan tahapan tahapan dalam pelaksanaan AKS, dimana hasil rekomendasi yang disampaikan oleh tim pakar di tindak lanjuti oleh tim teknis, dengan melakukan intervensi terhadap auditee dengan didukung oleh Pemkab. Tapsel.</li> </ul>
3	<p>Berapa Auditee yang dilakukan audit sampai saat ini</p> <p>Catin : - Ibu Hamil : 2 Ibu Nifas : 1 Baduta : - Balita : 2</p>
4	<p>Bagaimana proses pelaksanaan program Audit Kasus Stunting secara keseluruhan?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan program audit kasus stunting di Kab. Tapanuli Selatan telah berjalan dan sesuai dengan tahapan dalam pelaksanaan AKS</li> </ul>
5	<p>Apa saja indikator yang digunakan dalam monitoring pelaksanaan program Audit Kasus Stunting?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada empat indikator dengan cakupan di Kab. Tapsel yang meliputi pembentukan tim audit kasus stunting, pelaksanaan audit diseminasi, evaluasi tindak lanjut audit kasus stunting dan manajemen pendampingan keluarga.</li> </ul>
6	<p>Bagaimana sistem pelaporan dan evaluasi yang digunakan dalam monitoring program Audit Kasus Stunting?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi AKS ialah untuk menentukan relevansi intervensi, pemenuhan sasaran dan capaian pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan Stunting terhadap target yang telah ditetapkan, menilai efisiensi, efektifitas, dampak, dan keberlanjutan, serta menganalisis permasalahan dan faktor penyebab yang ditemukan, sehingga hasil evaluasi dapat menjadi umpan balik yang menyeluruh guna perbaikan arah kebijakan, strategi intervensi, perencanaan program dan kegiatan/intervensi percepatan penurunan stunting. sebagai alat untuk</li> <li>- Pelaporan AKS ialah untuk menyampaikan informasi, sebagai alat pengawasan, bahan penilaian serta sebagai salah satu materi dalam proses pengambilan keputusan.</li> </ul>
7	<p>Bagaimana respons dan tindak lanjut terhadap temuan atau hasil audit yang ditemukan dalam program Audit Kasus Stunting?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan pemahaman terhadap pencegahan dan penanganan kasus stunting pada kelompok sasaran berisiko stunting.</li> </ul>

8	<p>Apakah ada langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa rekomendasi dari program Audit Kasus Stunting diimplementasikan dan berdampak nyata dalam penanggulangan stunting?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Langkah pelaksanaan Audit Kasus Stunting setelah mengidentifikasi risiko stunting adalah mengetahui penyebab sebagai upaya pencegahan dan perbaikan tata laksana kasus serupa, analisis faktor risiko terjadinya stunting pada baduta/balita, kemudian akan diperoleh rekomendasi penanganan kasus dan perbaikan tata laksana kasus serta upaya pencegahan, terakhir yaitu memberikan respon/ tindak lanjut rekomendasi.</li> </ul>
---	---

<b>B</b>	<b>MINILOKAKARYA</b>
1.	<p>Berapa kecamatan yang melaksanakan minilokakarya setiap bulan?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 15 Kecamatan melaksanakan minilok setiap bulan di Kab. Tapsel</li> </ul>
2.	<p>Menurut Anda, Apakah tujuan dan sasaran dari kegiatan mini lokakarya stunting telah tercapai secara efektif?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tujuan dan sasaran dari kegiatan mini lokakarya stunting, sepenuhnya belum berjalan dengan efektif</li> <li>- Belum sepenuhnya menggali permasalahan terkait stunting di wilayah kerja kecamatan masing-masing, serta apa solusinya dan juga belum terkomunikasikannya program-program dan kegiatan yang sedang dan akan dilakukan terkait permasalahan stunting.</li> </ul>
3	<p>Bagaimana partisipasi dan respon dari peserta, termasuk stakeholder utama, terhadap materi dan diskusi dalam lokakarya?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Partisipasi serta respon dari peserta belum maksimal</li> </ul>
4	<p>Apakah terdapat kendala atau hambatan dalam proses pelaksanaan mini lokakarya? Jika ya, apa langkah yang telah diambil untuk mengatasinya?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada kendala.</li> </ul>
5	<p>Salah satu pembahasan dalam minilokakarya ada penetapan Verifikasi data kasus dan data sasaran risiko Stunting untuk audit kasus stunting?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam pelaksanaan AKS Kab. Tapsel menggunakan data pada ePPGBM</li> </ul>
6	<p>Apakah ada kendala atau tantangan yang muncul saat membahas proses pendampingan keluarga dalam penanganan stunting? Jika ya, bagaimana strategi yang dibuat untuk mengatasinya?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada kendala</li> </ul>
7	<p>Apakah tersedia alat ukur/aplikasi pengukuran untuk sasaran Stunting di setiap kecamatan/ kelurahan/posyandu?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sudah tersedia alat ukur Antropometri di seluruh Posyandu se Kab. Tapsel sebanyak 535 Posyandu.</li> </ul>

<b>C</b>	<b>KONVERGENSI</b>
1.	<p>Apakah sudah dilaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan stunting?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sudah terlaksana koordinasi dalam pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan stunting di Kab. Tapsel, dengan dilakukannya rapat rapat koordinasi antara seluruh OPD terkait stunting.</li> </ul>
2	<p>Apakah program konvergensi telah berhasil mengintegrasikan berbagai sektor yang berpengaruh terhadap penurunan stunting (seperti kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi)?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program konvergensi sudah berjalan di Kab. Tapsel</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dibidang kesehatan sosialisasi penggunaan PMT lokal, Monitoring posyandu</li> <li>- Dibidang pendidikan, telah dilaksanakanya sosialisasi cegah stunting dengan 1000 HPK kepada seluruh guru PAUD, SMP dan SMA</li> <li>- Dibidang sosial telah diberikanya bantuan sosial oleh Dinas Sosial Tapsel kepada masyarakat miskin, bantuan pendampingan berobat, bantuan gizi kurang.</li> <li>- Program BAAS</li> </ul>
3	<p>Bagaimana partisipasi masyarakat, khususnya keluarga yang menjadi sasaran, dalam program ini? Apakah mereka mendapatkan informasi dan dukungan yang cukup?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Partisipasi masyarakat sangat mendukung terhadap seluruh program dan bantuan yang diberikan oleh Pemkab. Tapsel dalam rangka penurunan angka stunting.</li> </ul>
4	<p>Bagaimana efektivitas program ini dalam mencapai tujuan penurunan angka stunting di tingkat kecamatan? Apakah ada peningkatan kualitas gizi dan kesehatan anak yang signifikan?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seluruh program yang menyentuh langsung kepada masyarakat sangat efektif terhadap peningkatan kualitas gizi di masyarakat.</li> </ul>
5	<p>Apakah ada tantangan atau hambatan dalam implementasi program ini? Bagaimana strategi yang diambil untuk mengatasinya?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sejauh ini tidak ada tantangan dan hambatan dalam mengimplementasikanya.</li> </ul>
6	<p>Bagaimana mekanisme monitoring dan evaluasi kegiatan konvergensi ini? Apa indikator penilaian yang digunakan cukup mencerminkan hasil yang diharapkan dari program konvergensi percepatan penurunan stunting?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Salah satunya Kabupaten Tapsel telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap posyandu di seluruh Desa/Kelurahan, yang diawasi langsung oleh masing masing OPD.</li> <li>- Indikator dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap posyandu ialah hasil ePPGBM yang meningkatnya jumlah balita yang diukur.</li> </ul>
7	<p>Mendorong Terlaksananya Rapat Koordinasi antar Bidang TPPS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat Koordinasi Bidang Intervensi Spesifik dan Sensitif Dilaksanakan secara periodik oleh 17 OPD terkait stunting</li> <li>- Rapat Koordinasi Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga Dilaksakana oleh Dinas Kesehatan, PPKB, Serta Camat dan Kepala Puskesmas</li> <li>- Rapat koordinasi Bidang konvergensi dan perencanaan Dilaksanakan oleh Bappeda, Dinas Kesehatan dan PPKB</li> <li>- Rapat Koordinasi bidang data, monev dan knowledge management Dilaksanakan oleh Bappeda, Dinas Kesehatan, PPKB, Inspektorat dan Dinas Pendidikan.</li> </ul>
<b>D</b>	<b>ELSIMIL</b>
1.	<p>Apakah sudah dilaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan Elsimil?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi sudah dilakukan antara sasaran catin, ibu hamil, ibu nifas, serta orang tua balita yang dilakukan oleh TPK dengan bimbingan Dinas PPKB</li> </ul>
2	<p>Bagaimana dampak penggunaan aplikasi ELSIMIL terhadap penurunan angka stunting di tingkat kecamatan? Apakah ada peningkatan kualitas gizi dan kesehatan yang signifikan sejak implementasi aplikasi ini?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dari hasil penggunaan aplikasi Elsimil adanya perubahan penurunan angka stunting di Kecamatan serta adanya peningkatan kualitas gizi dan kesehatan yang meningkat.di masyarakat.</li> </ul>
3	<p>Bagaimana tingkat penggunaan dan penerimaan aplikasi ELSIMIL oleh calon pengantin dan tim pendamping keluarga? Apakah mereka merasa aplikasi ini membantu dalam upaya penurunan stunting?</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat penggunaan dan penerimaan aplikasi Elsimil oleh calon pengantin (catin) serta tim TPK sudah sangat membantu.</li> </ul>
4	<p>Apakah terdapat kendala teknis atau hambatan dalam penggunaan aplikasi ELSIMIL? Jika ya, bagaimana solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah tersebut?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sering terjadi kendala teknis terhadap aplikasi Elsimil, jika ada kendala dalam pengimputan, maka TPK melaorkanya secara manual.</li> </ul>
5	<p>Apakah informasi yang dihasilkan oleh ELSIMIL telah digunakan secara efektif dalam upaya penurunan stunting, seperti perencanaan program atau intervensi?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi Elsimil belum sepenuhnya efektif digunakan dalam perencanaan program dan intervensi.</li> </ul>
6	<p>Apakah calon pengantin dan tim pendamping keluarga sudah memahami dan mampu menggunakan aplikasi ELSIMIL secara efektif?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum sepenuhnya Catin dan TPK memahami dan mampu dalam menggunakan aplikasi Elsimil</li> <li>- Diharapkan tetap dan berlanjut orientasi penggunaan aplikasi Elsimil kepada seluruh TPK</li> </ul>

E	TIM PENDAMPING KELUARGA
1.	<p>Berapa jumlah TPK di kabupaten/kota?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim Pendamping Keluarga (TPK) Kab. Tapsel sebanyak 855 TPK di 248 Desa/Kelurahan, sesuai SK DPPKB No. 800/017/2023</li> </ul>
2	<p>Berapa jumlah sasaran keluarga berisiko stunting di kabupaten/kota?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menurut hasil verval jumlah KBS di Kab. Tapsel sebesar 26.976 Keluarga</li> </ul>
3	<p>Apakah tim pendamping keluarga sudah melakukan pendampingan secara konsisten dan berkesinambungan? Bagaimana frekuensi dan intensitasnya?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim TPK masih belum maksimal dan konsisten dalam melakukan pendampingan.</li> </ul>
4	<p>Apakah terdapat peningkatan pengetahuan dan perilaku keluarga sasaran terkait penanganan stunting dan peningkatan kualitas gizi setelah mendapatkan pendampingan dari tim?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat peningkatan kualitas gizi terhadap perilaku sasaran setelah dilakukanya pendampingan oleh TPK.</li> </ul>
5	<p>Bagaimana pelatihan dan dukungan yang diberikan kepada tim pendamping keluarga dalam menjalankan tugasnya? Apakah mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan dan dukungan yang diberikan kepada TPK sudah berjalan tetapi belum maksimal.</li> <li>- Kendalanya masih sering terlaksana berhubung seringnya terjadi pergantian tim TPK oleh Kepala Desa.</li> </ul>
6	<p>Apakah terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi oleh tim pendamping keluarga dalam proses pendampingan? Jika ya, bagaimana strategi yang diambil untuk menyelesaikannya?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada kendala</li> </ul>

F	BAPAK/BUNDA ASUH STUNTING
1	<p>Bagaimana efektivitas distribusi bantuan dalam bentuk paket makanan tambahan, uang, dan bantuan lainnya kepada keluarga yang menjadi sasaran?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sangat efektif, berguna dan bermanfaat terhadap sasaran yang diberikan bantuan</li> </ul>

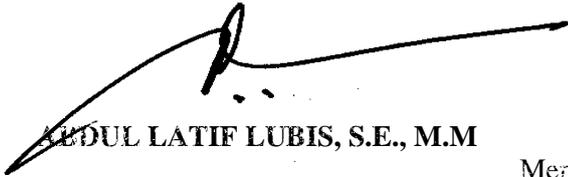
	BAAS, hanya di Kab. Tapsel lebih efektif pemberian dalam bentuk PMT dan tidak dalam bentuk uang.
2	<p>Bagaimana realisasi Program BAAS ?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terhitung bulan Juni 2023 sampai bulan Nopember 2023 realisasi Program BAAS yang dicanangkan oleh Bupati Kab. Tapsel berjalan dengan lancar dengan melibatkan seluruh OPD di Kab. Tapsel serta T.A Satgas Kab. Tapsel</li> <li>- Program BAAS Kab. Tapsel telah melibatkan seluruh stake holder, terdiri dari Bupati Tapsel, 2 perusahaan nasional (PT. Agincourt Resources Tbk dan PT. Toba Pulp Lestari Tbk), 112 OPD serta T.A Satgas Kab. Tapsel dengan menyumbangkan bantuan PMT senilai Rp. 571.800.000,- selama 6 bulan.</li> </ul>
3	<p>Apakah penerima manfaat BAAS ini sudah tepat sasaran?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerima manfaat BAAS yang ada di Kab. Tapsel sudah tepat sasaran karena data yang digunakan bersumber dari Data ePPGBM Dinas Kesehatan Tapsel.</li> </ul>
4	<p>Bagaiman penetapan penerima manfaat BAAS?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bupati Tapanuli Selatan telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan tentang Pengelola Program BAAS Kab. Tapsel Nomor 188.45/169/KPTS/2023, tanggal 18 April 2023.</li> <li>- Bupati Tapanuli Selatan telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan tentang Penetapan Bapak Asuh Tahap 1 Nomor 400.2.1/3140/2023 tanggal 29 Mei 2023.</li> </ul>
5	<p>Apakah ada kendala atau hambatan dalam pelaksanaan program BAAS, termasuk distribusi dan pemantauan penggunaan bantuan? Jika ya, bagaimana langkah yang diambil untuk mengatasinya?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada kendala</li> </ul>

G	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN
1	<p>Apakah distribusi makanan tambahan kepada ibu hamil dan balita telah berjalan dengan baik dan efisien? Apakah semua keluarga sasaran mendapatkan bantuan tersebut?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sudah berjalan dengan baik</li> <li>- Semua keluarga sasaran mendapatkan bantuan</li> </ul>
2	<p>Dari mana saja sumber dana PMT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sumber dana PMT berasal dari BOK/APBN (Dinkes Tapsel)</li> <li>- Sumber dana PMT berasal dari APBD Kab. Tapsel (Dinas Ketapang)</li> </ul>
3	<p>Bagaimana realisasi/ implementasi program PMT?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berjalan dan tepat sasaran, data bersumber dari ePPGBM</li> </ul>
4	<p>Apakah ada kendala atau tantangan dalam pelaksanaan program ini, baik dari sisi distribusi, penerimaan masyarakat, atau dampaknya terhadap status gizi? Jika ada, bagaimana strategi yang diambil untuk menyelesaikannya?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada kendala.</li> </ul>

H	INFORMASI TAMBAHAN
1	<p>Praktik Baik apa yang sudah dikerjakan?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam rangka menghadapi survey oleh SKI, Bupati Tapsel telah memberikan bantuan sebesar Rp. 15.000.000,- per Desa/Kelurahan sebanyak 66 Desa/Kelurahan untuk perbaikan jamban</li> <li>- BAAS bulan Juni-Nopember 2023 untuk 172 anak asuh sebesar Rp. 571.800.000,-</li> <li>- Monitoring posyandu oleh seluruh OPD, untuk melihat dan mengawasi apakah posyandu sudah sesuai dan sudah berjalan di setiap Desa/Kelurahan</li> <li>- Pelatihan dan sosialisasi penurunan stunting kepada seluruh tim TPK se Kab. Tapsel yang dilaksanakan oleh APDESI Kab. Tapsel.</li> </ul>
2	<p>Rencana Aksi di bulan Desember?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nopember – Desember 2023, Pelaksanaan pelatihan bagi TPK dalam rangka penurunan angka stunting di Kab. Tapsel bersama APDESI (Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia) Kab. Tapsel</li> <li>- Pelaksanaan Program BAAS tahap ke 2 bulan Desember 2023 – Mei 2024</li> </ul>
3	<p>Visi apa yang akan dikerjakan di Tahun 2024?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melalui Visi dan Misi Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan yaitu Menjadikan Kab. Tapanuli Selatan yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera, dan di Tahun 2024 Kab. Tapsel Bebas Stunting dan Gizi Buruk.</li> </ul>

4	<p>Kesan dan Pesan di tahun 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahun 2023 adalah tahun dimana Kab. Tapsel terus berupaya dan berbenah memperbaiki semua aspek baik pembangunan Infrastruktur, SDM dan perbaikan kesehatan kepada masyarakat. Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan bersama stake holder dan didukung oleh T.A Satgas Stunting sedang berupaya menurunkan angka prevalensi stunting di Kabupaten Tapanuli Selatan dan optimis tahun 2023 akan bisa meraih penghargaan percepatan penurunan stunting dari Pemerintah Pusat.</li> </ul>
---	---

**TECHNICAL ASISSTANT SATGAS STUNTING  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**



**ABDUL LATIF LUBIS, S.E., M.M**

Mengetahui,  
**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
SELAKU SEKRETARIS TIM PERCEPATAN PENURUNAN  
STUNTING KAB. TAPANULI SELATAN**



**AHMAD IBRAHIM LUBIS, S.Sos., M.M**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19740205 199602 1 003**

**BAB IX**  
**CAPAIAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING**  
**KAB. TAPANULI SELATAN TAHUN 2023**

NO	KEGIATAN	SELESAI/ BELUM	PROSES	CAPAIAN KEGIATAN
1	PERBUB. PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KAB. TAPSEL	SELESAI	-	PERBUP. NO. 132/2022
2	TIM TPPS KAB. TAPANULI SELATAN	SELESAI	-	SK BUP. TS NO. 188.45/76/KPTS/2022
3	SK. AUDIT KASUS STUNTING ( AKS )	SELESAI	-	SK. KETUA TPPS NO. 463/1279/2022
4	TIM TPPS 15 KECAMATAN	SELESAI	-	SK. KETUA TPPS NO. 463/1303/2022
5	TIM TPPS DESA/KEL	SELESAI	-	212 DESA/36 KEL ( SELESAI )
6	INPUT DATA WEB. BANGDA MASTER ANSIT 8 - AKSI KONVERGENSI - THN 2023	BELUM	-	POSISI KAB/KOTA ( 10/100 % ) AKSI 1-7
7	AKSI KE 8 REVIUW KINERJA TAHUN 2023	BELUM	-	29 JANUARI 2024
8	AUDIT KASUS STUNTING DISEMINASI 1 DAN 2 / LAPORAN	SELESAI	-	DISEMINASI KE 1 (09 FEBRUARI 2023) DISEMINASI KE 2 (26 SEPTEMBER 2023)
9	B A A S (BAPAK ASUH) KAB. TAPSEL 2023	SELESAI	-	TERLAKSANA/SURAT PENETAPAN BUPATI NO. 400.2.1/3140/2023 (112 OPD)
11	REALISASI BOKB MORENA AKS	SELESAI	-	PAGU Rp. 80.000.000,- REALISASI : Rp. 79.936.000,- ( 98,67 % )
12	SURVEY SKI OLEH ENUMERATOR 66 BLOCK SENSUS	SELESAI	-	TGL. 11 AGUST – 24 SEPT 2023 (KEMENKES)
13	e - P P G B M – TAHUN 2023 (DES 2023)	SELESAI	-	STUNTING = 141 BALITA /UPDATE TIAP BULAN
14	MONITORING POSYANDU – THN 2023	SELESAI	-	TERLAKSANA (JADWAL SELURUH OPD)
15	BANTUAN BUPATI UNTUK PEMBANGUNAN JAMBAN SEHAT PADA 66 DESA/KEL	SELESAI	-	SEPTEMBER – OKTOBER 2023 Rp. 15.000.000,- PER DESA/KEL (TOTAL : Rp. 990.000.000,-)

NO	KEGIATAN	SELESAI/ BELUM	PROSES	CAPAIAN KEGIATAN
16	DESA LOKUS KAB. TAPSEL TAHUN 2022- 2024 THN 2022 = 6 KEC, 13 DESA THN 2023 = 7 KEC, 13 DESA THN 2024 = 12 KEC, 42 DESA	SELESAI	-	SK. BUP. TS NO. 188.45/540/KPTS/2021 SK. BUP. TS NO. 188.45/232/KPTS/2023 68 DESA LOKUS DARI 212 DESA
17	PENGUNAAN DANA DESA 10 % UNTUK PENANGANAN STUNTING	SELESAI	-	SURAT BUP. TS NO. 900/605/2023 ( SUDAH BERJALAN )
18	855 TPK (TIM PENDAMPING KELUARGA) KAB. TAPSEL 3 PER DESA (BID.DESA, PKK, KADER KB ) TAHUN 2023	SELESAI	-	SK. KADIS DPPKB TS. NO. 800/017/2023 TGL. 03 JANUARI 2023
19	ORIENTASI TPK	SELESAI	-	SUDAH TERLAKSANA DI KEC (DPPKB TS)
20	PELATIHAN KADER POSYANDU	SELESAI	-	SUDAH TERLAKSANA (DINKES TS)
21	VERVAL DATA KBS (BKKBN-DPPKB) PK 22	SELESAI	-	35.997 kk –26.976 kk = 9.021 kk (25,06 % )
22	LAP. TPPS KAB. TAPSEL (SEMESTER - I/2023)	SELESAI	-	01 JULI 2023
23	LAP. TPPS KAB. TAPSEL (SEMESTER –II/ 2023)	SELESAI	-	28 DESEMBER 2023
24	ALAT TIMBANG ANTROPOMETRI UNTUK 535 POSYANDU	SELESAI	-	SUDAH TERSEDIA 535 ANTROPOMETRI DI POSYANDU (DINKES TS)
25	ALAT USG UNTUK 17 PUSKESMAS	SELESAI	-	17 PUSKESMAS SUDAH MEMILIKI USG
26	MONITORING DAN EVALUASI PERC. PENURUNAN STUNTING DI KAB. TAPSEL OLEH BPKP PERW. SUMUT	SELESAI	-	11 – 18 April 2023
27	ZOOM MEETING DENGAN BPK RI TENTANG PERC. PENURUNAN STUNTING DI KAB. TAPSEL 2022 - 2023	SELESAI	-	30 AGUSTUS 2023
28	ZOOM MEETING BKKBN RI TENTANG SERAPAN BOKB DINAS PPKB KAB. TAPSEL TAHUN 2022	SELESAI	-	04 SEPTEMBER 2023
29	REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK S/D 27 NOPEMBER 2023	SELESAI	-	PAGU Rp. 1.909.800.000,- REALISASI ( 90, 65 % )
30	REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK S/D 27 NOPEMBER 2023	SELESAI	-	PAGU Rp. 6.836157.000,- REALISASI ( 70, 36 % )

## **BAB X**

### **PENUTUP**

Stunting menjadi masalah dunia karena implikasinya menentukan masa depan bangsa. Beberapa kendala pelaksanaan pencapaian target penurunan stunting antara lain karena belum tersedianya strategi komprehensif untuk dijabarkan dalam pelaksanaan program intervensi mendukung pencegahan stunting, mulai perbaikan gizi dan kesehatan ibu dan anak balita pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK). Dalam jangka pendek perlu dioptimalkan intervensi gizi spesifik dan sensitif, sedangkan strategi jangka panjang perlu diintensifkan penguatan dukungan kolaborasi antar sektor dan multistakeholders guna menjamin keberlanjutan dan pencapaian sasaran akselerasi penurunan stunting. Selain itu perlu penerapan strategi Public Private Partnership dalam upaya pencegahan tatakelola (governance) diperlukan komitmen penjabaran operasional agar menjamin program pencegahan stunting berjalan dengan maksimal sehingga target nasional percepatan penurunan stunting sebesar 14% tahun 2024 dapat dicapai.